

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan

Gambaran Umum Perkembangan Inflasi

Triwulan II Tahun 2026 ditandai dengan meningkatnya tekanan inflasi di Kota Dumai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, inflasi bulanan (*month-to-month*) tercatat sebesar **0,15 persen pada April**, meningkat menjadi **0,54 persen pada Mei**, dan **0,48 persen pada Juni**. Sejalan dengan itu, inflasi tahunan (*year-on-year*) meningkat dari **2,45 persen pada April** menjadi **3,71 persen pada Mei**, dan mencapai **4,30 persen pada Juni**. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga selama triwulan ini mengalami penguatan secara bertahap.

Peningkatan inflasi tersebut tercermin pula pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kota Dumai meningkat dari **112,18 pada April** menjadi **112,79 pada Mei**, dan **113,33 pada Juni 2026**. Kenaikan IHK menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara umum, dinamika inflasi selama Triwulan II masih didominasi oleh kelompok pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, terutama kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, disertai tekanan pada kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Transportasi**, serta **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Kota Dumai masih didominasi oleh komponen pangan dan beberapa komoditas yang dipengaruhi oleh faktor musiman serta perkembangan harga komoditas strategis.

Perkembangan Inflasi Bulanan

a. April 2026

Setelah mengalami deflasi pada Maret 2026, Kota Dumai kembali mengalami inflasi pada April 2026 sebesar **0,15 persen (m-to-m)** dengan IHK **112,18**. Secara tahunan, inflasi tercatat **2,45 persen**, sedangkan inflasi tahun kalender (*year-to-date*) masih menunjukkan **deflasi 0,05 persen**.

Inflasi bulanan terutama berasal dari kelompok **Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** yang memberikan andil inflasi sebesar **0,05 persen**, diikuti kelompok **Transportasi, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, serta **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain **bensin, bawang merah, emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan jengkol**, sedangkan penurunan harga cabai merah dan daging ayam ras menahan laju inflasi yang lebih tinggi.

b. Mei 2026

Pada Mei 2026 tekanan inflasi meningkat. Inflasi bulanan mencapai **0,54 persen**, dengan IHK meningkat menjadi **112,79**. Inflasi tahun kalender berubah menjadi **0,49 persen**, sedangkan inflasi tahunan meningkat menjadi **3,71 persen**.

Peningkatan inflasi didorong oleh kenaikan harga pada kelompok **Transportasi, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**, serta **Makanan, Minuman, dan Tembakau**. Komoditas yang dominan memberikan tekanan inflasi meliputi **cabai merah, bensin, tomat, minyak goreng, bawang merah, pepaya, dan telepon seluler**. Di sisi tahunan, kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil terbesar, diikuti kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** serta **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**.

c. Juni 2026

Tekanan inflasi masih berlanjut pada Juni 2026. Inflasi bulanan tercatat **0,48 persen**, sehingga inflasi tahun kalender meningkat menjadi **0,97 persen**, sedangkan inflasi tahunan mencapai **4,30 persen** dengan IHK **113,33**.

Kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** masih menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi dengan inflasi tahunan sebesar **6,22 persen** dan andil **1,90 persen**. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain **cabai merah, bawang merah, ikan tongkol/ambu-ambu, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, ikan serai, daging ayam ras, cabai rawit, beras, serta berbagai komoditas ikan konsumsi**.

Selain itu, kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar **10,08 persen**, sedangkan kelompok **Transportasi** mengalami inflasi tahunan sebesar **3,82 persen**.

Analisis Perkembangan Inflasi Triwulan II

Perkembangan inflasi selama Triwulan II menunjukkan adanya **penguatan tekanan harga secara bertahap**, baik ditinjau dari inflasi bulanan maupun inflasi tahunan. Kenaikan inflasi tahunan dari **2,45 persen pada April** menjadi **4,30 persen pada Juni** mengindikasikan bahwa tekanan harga tidak bersifat insidental dalam satu bulan tertentu, melainkan berlangsung secara berkelanjutan selama triwulan.

Dari sisi struktur pembentuk inflasi, kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap inflasi tahunan. Di samping itu, kelompok **Transportasi, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, serta **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** turut memberikan tekanan terhadap kenaikan indeks harga konsumen. Pola tersebut menunjukkan bahwa dinamika inflasi Kota Dumai pada Triwulan II terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan strategis dan beberapa komoditas nonpangan yang memiliki bobot cukup besar dalam pembentukan IHK.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kondisi inflasi pada Triwulan II menjadi dasar bagi TPID Kota Dumai untuk memperkuat langkah stabilisasi harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan inflasi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada Bab II mengenai identifikasi permasalahan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian deflasi di Daerah

Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Dumai selama Triwulan II Tahun 2026, dapat diidentifikasi bahwa tekanan inflasi mulai meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun secara umum inflasi masih berada dalam kisaran yang terkendali, pola pergerakan harga menunjukkan adanya peningkatan risiko yang perlu diantisipasi melalui penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beserta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait. Permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 diidentifikasi sebagai berikut.

1. Meningkatnya Tren Inflasi Selama Triwulan II

Perkembangan inflasi Kota Dumai menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap sepanjang Triwulan II Tahun 2026. Inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) meningkat dari **2,45 persen pada April**, menjadi **3,71 persen pada Mei**, dan kembali meningkat menjadi **4,08 persen pada Juni**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang libur sekolah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian inflasi pada Triwulan II menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan Triwulan I. Tekanan inflasi tidak lagi bersifat sementara, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan sehingga memerlukan respons kebijakan yang lebih antisipatif.

2. Meningkatnya Dominasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Permasalahan utama pengendalian inflasi pada Triwulan II berasal dari kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau**. Tingkat inflasi kelompok ini meningkat cukup tajam, yaitu dari **2,10 persen pada April**, menjadi **5,38 persen pada Mei**, dan kembali meningkat menjadi **6,22 persen pada Juni**. Kelompok ini juga menjadi penyumbang andil inflasi terbesar terhadap pembentukan inflasi Kota Dumai selama Triwulan II.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kota Dumai mulai didominasi oleh komponen **volatile food**, sehingga kestabilan harga menjadi sangat bergantung pada kelancaran pasokan, distribusi, serta kecukupan produksi komoditas pangan strategis.

3. Tingginya Volatilitas Harga Komoditas Pangan Strategis

Beberapa komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Triwulan II.

Komoditas seperti **cabai merah, beras, tomat, cabai rawit, ikan tongkol, ikan patin, daging ayam ras, telur ayam ras, dan berbagai komoditas hortikultura** secara bergantian menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas pangan masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi cuaca, pasokan dari daerah sentra produksi, serta perubahan permintaan masyarakat. Tingginya volatilitas harga menyebabkan inflasi pangan menjadi lebih sulit diprediksi dan membutuhkan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) melalui pemantauan harga dan stok secara lebih intensif.

4. Meningkatnya Tekanan pada Kelompok Transportasi dan Energi

Selain pangan, tekanan inflasi juga berasal dari kelompok **Transportasi** yang mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I.

Kenaikan harga **bensin**, meningkatnya biaya transportasi, serta bertambahnya mobilitas masyarakat selama HBKN memberikan dampak lanjutan terhadap biaya distribusi barang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya logistik sehingga memengaruhi harga jual berbagai komoditas kebutuhan pokok di tingkat konsumen.

Apabila tidak diantisipasi, peningkatan biaya distribusi dapat memicu **second-round effect**, yaitu kenaikan harga barang secara lebih luas akibat meningkatnya biaya transportasi.

5. Tekanan Inflasi Tidak Lagi Terbatas pada Komoditas Pangan

Perkembangan inflasi Triwulan II menunjukkan bahwa tekanan harga mulai meluas ke kelompok pengeluaran lainnya.

Kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** masih mencatat tingkat inflasi yang tinggi sepanjang triwulan, sedangkan kelompok **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** serta **Transportasi** juga menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi pasokan pangan, tetapi juga mulai dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap berbagai jasa seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, strategi pengendalian inflasi tidak cukup hanya berfokus pada stabilisasi harga pangan, tetapi juga perlu memperhatikan dinamika sektor jasa dan transportasi yang mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi daerah.

6. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Karakteristik Kota Dumai yang masih bergantung pada pasokan komoditas pangan dari berbagai daerah di Sumatera menyebabkan stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi di luar wilayah. Gangguan cuaca, keterlambatan distribusi, maupun peningkatan biaya logistik pada daerah pemasok berpotensi langsung memengaruhi harga komoditas di Kota Dumai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kerja sama antar daerah (KAD), diversifikasi sumber pasokan, serta peningkatan produksi pangan lokal masih menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas harga jangka menengah dan jangka panjang.

Ringkasan Permasalahan

Berdasarkan perkembangan inflasi Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pengendalian inflasi di Kota Dumai meliputi:

- meningkatnya tren inflasi sepanjang Triwulan II yang menunjukkan tekanan harga semakin menguat;
- dominasi kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau** sebagai penyumbang utama inflasi;
- tingginya volatilitas harga komoditas pangan strategis, khususnya cabai merah, bawang merah, beras, ikan, dan daging ayam ras;
- meningkatnya tekanan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM dan transportasi yang berpotensi menimbulkan **second-round effect**;
- meluasnya tekanan inflasi ke kelompok jasa sehingga memerlukan strategi pengendalian yang lebih komprehensif; dan
- masih tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang menyebabkan Kota Dumai rentan terhadap gangguan rantai pasok.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III perlu diarahkan pada penguatan strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat sebagai upaya menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam menghadapi meningkatnya tekanan inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kota Dumai melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok penting. Pelaksanaan kebijakan diarahkan pada implementasi strategi **4K**, yaitu menjaga **Keterjangkauan Harga**, **Ketersediaan Pasokan**, **Kelancaran Distribusi**, dan **Komunikasi Efektif**, sebagai strategi nasional pengendalian inflasi.

Berbagai langkah pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Pemerintah Kota Dumai, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Satgas Pangan, KADIN, pelaku usaha, distributor, serta seluruh perangkat daerah anggota TPID. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi penting mengingat karakteristik Kota Dumai yang masih bergantung pada pasokan komoditas pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi harga di daerah pemasok.

A. Penguatan Koordinasi Melalui High Level Meeting (HLM) TPID

Sebagai langkah antisipatif menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 H, TPID Kota Dumai menyelenggarakan **High Level Meeting (HLM)** pada tanggal **19 Mei 2026** dengan tema "**Ketersediaan Pasokan dan Keterjangkauan Harga Menjelang Perayaan Iduladha 1447 H/2026 M di Kota Dumai**".

Rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Dumai dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Bulog, KADIN, perangkat daerah anggota TPID, serta instansi vertikal terkait. Setelah rapat, kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, distributor, dan agen bahan pokok di Kota Dumai untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Dalam HLM tersebut dibahas perkembangan inflasi terkini, kondisi ketersediaan stok pangan, potensi risiko kenaikan harga menjelang Iduladha, serta langkah-langkah strategis yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh anggota TPID. Forum ini menjadi media utama penyalarsan kebijakan antarinstansi sehingga setiap intervensi dilakukan secara tepat waktu, berbasis data, dan sesuai dengan perkembangan harga di lapangan.

B. Menjaga Keterjangkauan Harga

Untuk menjaga daya beli masyarakat, TPID Kota Dumai secara konsisten melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** setiap dua pekan sekali di kawasan Taman Bukit Gelanggang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga ketika terjadi peningkatan permintaan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan arahan Wakil Wali Kota Dumai dalam HLM, Dinas Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diarahkan untuk melaksanakan Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berbasis perkembangan harga harian. Pendekatan ini diharapkan mampu meredam gejolak harga komoditas strategis, khususnya beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam menjelang Iduladha.

C. Menjamin Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan pasokan menjadi fokus utama selama Triwulan II mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang HBKN. Dalam HLM, Bulog menyampaikan bahwa stok beras pemerintah mencapai sekitar **4.800 ton** dan dipastikan mencukupi hingga Idul Adha, sedangkan stok Minyakita sekitar **37 ribu liter** masih mampu memenuhi kebutuhan pasar hingga akhir Mei 2026. Informasi ini menjadi dasar bahwa secara umum ketersediaan pangan strategis berada dalam kondisi aman, meskipun distribusi minyak goreng masih menghadapi beberapa kendala administratif melalui sistem SiMirah.

Meminimalisir kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Dumai menginstruksikan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bulog, distributor, agen, serta pelaku usaha untuk memastikan kecukupan stok seluruh komoditas strategis guna mengantisipasi kelangkaan maupun *panic buying* selama periode Idul Adha.

D. Memperlancar Distribusi Barang

Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kota Dumai yang sebagian besar kebutuhan pangannya berasal dari luar daerah. Melalui HLM, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mendorong Pemerintah Kota Dumai untuk memperkuat **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** sebagai strategi menjamin kontinuitas pasokan pangan dari daerah sentra produksi. Rekomendasi tersebut menjadi penting mengingat tingginya ketergantungan Kota Dumai terhadap pasokan komoditas dari luar wilayah.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan secara rutin melakukan pemantauan terhadap kelancaran arus kendaraan serta memastikan ketersediaan BBM menjelang Iduladha.

Berdasarkan hasil pemantauan, distribusi BBM masih berjalan lancar dan tidak ditemukan antrian panjang yang berpotensi mengganggu aktivitas distribusi barang. Sebagai bentuk pengawasan distribusi, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga diperintahkan meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi bahan pokok guna mencegah praktik penimbunan, spekulasi harga, dan gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

E. Penguatan Sistem Pemantauan Harga dan Stok

TPID Kota Dumai terus memperkuat sistem pemantauan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.

Selama Triwulan II dilakukan pencatatan dan pelaporan harga bahan pokok penting setiap hari di pasar tradisional, serta pemantauan stok bahan pokok setiap bulan pada distributor dan agen. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga maupun penurunan ketersediaan stok.

Selain itu, Wakil Wali Kota Dumai menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah terkait meningkatkan intensitas monitoring harga dan stok melalui sidak langsung ke pasar tradisional, distributor, agen, dan pusat perdagangan sehingga potensi kenaikan harga dapat segera direspons sebelum berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.

F. Penguatan Komunikasi Efektif

Sebagai bagian dari pengendalian ekspektasi inflasi, TPID Kota Dumai secara rutin menyampaikan perkembangan inflasi melalui rilis resmi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada setiap awal bulan. Informasi tersebut menjadi media edukasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi pemerintah dalam menyampaikan perkembangan harga dan kondisi inflasi daerah.

Di samping itu, TPID Kota Dumai secara aktif mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap pekan secara daring. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi nasional, pertukaran informasi, serta penyalarsan langkah-langkah pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam HLM, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi publik melalui penyampaian informasi resmi mengenai kondisi inflasi, ketersediaan bahan pokok, serta berbagai langkah intervensi pemerintah guna menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah terbentuknya ekspektasi inflasi yang berlebihan.

G. Pelaksanaan Kebijakan Secara Terintegrasi

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa TPID Kota Dumai telah mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan mengintegrasikan fungsi koordinasi, pemantauan, stabilisasi harga, pengamanan distribusi, dan komunikasi publik dalam satu rangkaian kebijakan yang saling mendukung. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi peningkatan tekanan inflasi menjelang Iduladha, menjaga stabilitas pasokan pangan, memperkuat kelancaran distribusi, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kota Dumai tidak hanya dilakukan melalui intervensi pasar, tetapi dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan kebijakan berbasis data, koordinasi lintas sektor, penguatan pengawasan lapangan, hingga pengelolaan ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada Triwulan II telah selaras dengan strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan **4K** yang menjadi pedoman TPIP dan TPID.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian deflasi di daerah

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 mampu menjawab permasalahan inflasi yang berkembang di Kota Dumai. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan terlaksananya kegiatan, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara kebijakan yang diambil dengan dinamika inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), karakteristik tekanan harga, serta efektivitas implementasi strategi **Keterjangkauan Harga**, **Ketersediaan Pasokan**, **Kelancaran**

Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).

Selama Triwulan II Tahun 2026, inflasi Kota Dumai menunjukkan kecenderungan meningkat. Inflasi tahunan (year-on-year) meningkat dari **2,45 persen pada April**, menjadi **3,71 persen pada Mei**, dan mencapai **4,08 persen pada Juni**. Di sisi lain, inflasi bulanan masih berada pada tingkat yang relatif moderat, yaitu **0,15 persen pada April** dan **0,54 persen pada Mei**, yang mengindikasikan bahwa tekanan harga meningkat secara bertahap dan tidak terjadi lonjakan yang bersifat ekstrem dalam satu bulan tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TPID Kota Dumai mampu menjaga stabilitas harga pada tingkat tertentu, namun belum sepenuhnya mampu menahan peningkatan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor musiman, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta fluktuasi harga komoditas pangan strategis.

A. Evaluasi Strategi Keterjangkauan Harga

Strategi menjaga keterjangkauan harga dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga harian, serta kesiapsiagaan pelaksanaan operasi pasar menjelang Iduladha. Kebijakan tersebut telah diarahkan pada komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam.

Dari sisi implementasi, kebijakan ini dinilai **tepat sasaran** karena difokuskan pada komoditas strategis yang dikonsumsi masyarakat luas dan memiliki andil besar terhadap inflasi. Namun, perkembangan data BPS menunjukkan bahwa kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau** tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang Mei dan Juni 2026.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan lebih efektif dalam **meredam laju kenaikan harga** dibandingkan **membalikkan arah kenaikan harga**. Dengan kata lain, kebijakan stabilisasi telah berfungsi sebagai instrumen mitigasi, namun belum mampu menghilangkan tekanan inflasi yang berasal dari keterbatasan pasokan dan meningkatnya permintaan musiman.

B. Evaluasi Strategi Ketersediaan Pasokan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi menjaga ketersediaan pasokan berjalan relatif baik.

Melalui koordinasi TPID, Pemerintah Kota Dumai memperoleh kepastian mengenai kondisi stok pangan strategis. Perum Bulog melaporkan bahwa stok beras pemerintah sekitar **4.800 ton** masih mencukupi hingga Iduladha, sedangkan stok Minyakita sekitar **37 ribu liter** diproyeksikan aman hingga akhir Mei 2026.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa selama Triwulan II tidak terjadi gangguan pasokan secara luas terhadap komoditas utama. Dengan demikian, peningkatan inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh dinamika harga beberapa komoditas tertentu daripada kelangkaan bahan pokok secara umum.

Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Dumai terhadap

daerah pemasok masih menjadi tantangan struktural. Fluktuasi harga cabai merah, bawang merah, tomat, dan beberapa komoditas hortikultura selama Mei-Juni mengindikasikan bahwa stabilitas harga lokal masih sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi dari luar daerah.

Oleh karena itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) perlu terus menjadi prioritas sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang.

C. Evaluasi Strategi Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas harga selama Triwulan II.

Melalui koordinasi lintas sektor, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan terhadap arus kendaraan dan ketersediaan BBM menjelang Iduladha. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa distribusi BBM berjalan lancar dan tidak ditemukan antrean panjang yang berpotensi menghambat distribusi barang. Selain itu, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan rantai distribusi guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.

Evaluasi menunjukkan bahwa langkah tersebut berkontribusi menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis. Namun demikian, tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan kenaikan harga bensin masih memberikan dampak terhadap biaya distribusi sehingga diperlukan penguatan koordinasi dengan pelaku distribusi dan daerah pemasok untuk mengurangi risiko kenaikan biaya logistik.

D. Evaluasi Strategi Komunikasi Efektif

Strategi komunikasi efektif dilaksanakan melalui penyampaian informasi perkembangan inflasi, pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala, publikasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan High Level Meeting (HLM) menjelang Iduladha.

Dari sisi tata kelola, komunikasi antarpemangku kepentingan berjalan dengan baik. HLM mampu menyatukan persepsi seluruh anggota TPID mengenai kondisi inflasi, kecukupan stok, dan langkah antisipatif yang harus segera dilaksanakan. Arahan Wakil Wali Kota juga telah memberikan kejelasan mengenai pembagian peran masing-masing perangkat daerah dalam pengendalian inflasi.

Namun demikian, efektivitas komunikasi publik kepada masyarakat masih perlu terus diperkuat, terutama dalam membangun ekspektasi harga yang positif pada saat terjadi peningkatan permintaan menjelang HBKN. Komunikasi yang cepat, konsisten, dan berbasis data akan semakin penting untuk mencegah *panic buying* maupun spekulasi harga.

E. Evaluasi Sinergi Antarinstansi

Salah satu kekuatan utama pengendalian inflasi Kota Dumai selama Triwulan II adalah kuatnya sinergi antarinstansi. Pemerintah Kota Dumai berhasil mengintegrasikan peran perangkat daerah, Bank Indonesia, BPS, Perum Bulog, Satgas Pangan, pelaku usaha, dan instansi vertikal melalui forum koordinasi yang dilaksanakan secara berkala.

Sinergi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat berdasarkan kondisi lapangan, terutama dalam memastikan kecukupan stok, pengawasan distribusi, serta pelaksanaan intervensi pasar menjelang Iduladha.

Meskipun demikian, penguatan koordinasi dengan daerah pemasok masih perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar komoditas pangan Kota Dumai masih berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, kerja sama antar daerah perlu diperluas agar tidak hanya bersifat responsif pada saat terjadi gejolak harga, tetapi juga menjadi mekanisme permanen untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Kesimpulan Evaluasi

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan arah strategi nasional 4K. Seluruh instrumen utama pengendalian inflasi, mulai dari penguatan koordinasi, stabilisasi harga, pengamanan pasokan, pengawasan distribusi, hingga komunikasi publik telah dilaksanakan secara terpadu.

Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Dumai, khususnya tingginya volatilitas harga komoditas pangan dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya inflasi tahunan selama Triwulan II meskipun berbagai langkah stabilisasi telah dilakukan. Dengan demikian, fokus kebijakan pada triwulan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pasokan pangan, perluasan kerja sama antar daerah, peningkatan efektivitas intervensi terhadap komoditas berisiko tinggi, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis data harga dan stok sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa TPID Kota Dumai telah melaksanakan berbagai langkah strategis sesuai dengan kerangka pengendalian inflasi nasional melalui pendekatan **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K)**. Koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik, pelaksanaan High Level Meeting (HLM) mampu memperkuat sinergi antarinstansi, serta berbagai upaya stabilisasi harga telah dilaksanakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

Namun demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tekanan inflasi

tahunan di Kota Dumai masih mengalami peningkatan dari **2,45 persen pada April**, menjadi **3,71 persen pada Mei**, dan **4,08 persen pada Juni 2026**. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai intervensi yang telah dilakukan berperan dalam menjaga stabilitas harga, tetapi belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan inflasi yang berasal dari meningkatnya permintaan musiman, volatilitas harga komoditas pangan strategis, serta tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi prioritas pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat Pengendalian Komoditas Penyumbang Utama Inflasi

Pengendalian inflasi perlu difokuskan pada komoditas yang secara konsisten memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Dumai, khususnya **cabai merah, bawang merah, beras, daging ayam ras, ikan konsumsi, minyak goreng, dan bensin**. Komoditas tersebut berulang kali muncul sebagai penyumbang inflasi selama April-Juni 2026 sehingga memerlukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara lebih intensif. Intervensi kebijakan hendaknya berbasis prioritas komoditas sehingga sumber daya TPID dapat diarahkan pada faktor-faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap pembentukan inflasi daerah.

2. Memperkuat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Pemantauan harga harian yang telah berjalan perlu ditingkatkan menjadi sistem peringatan dini yang mampu mengidentifikasi potensi gejolak harga sebelum berkembang menjadi tekanan inflasi.

Sistem tersebut perlu mengintegrasikan informasi mengenai harga, stok, distribusi, pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan pasokan dari daerah pemasok. Dengan demikian, TPID memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan waktu, lokasi, dan bentuk intervensi yang paling tepat.

3. Memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Evaluasi menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Dumai terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi faktor struktural yang memengaruhi stabilitas harga.

Oleh karena itu, kerja sama antar daerah perlu diperkuat melalui penyusunan kesepakatan yang lebih berkelanjutan dengan daerah sentra produksi komoditas pangan strategis. Penguatan KAD diharapkan tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga, tetapi menjadi mekanisme permanen untuk menjaga kontinuitas pasokan dan mengurangi

risiko gangguan distribusi.

4. Meningkatkan Efektivitas Intervensi Pasar

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar perlu semakin berbasis data sehingga pelaksanaannya diarahkan pada komoditas, lokasi, dan waktu yang memiliki tingkat risiko inflasi paling tinggi.

Evaluasi juga menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara hasil pemantauan harga harian dengan keputusan pelaksanaan intervensi, sehingga respon pemerintah menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.

5. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Rantai Pasok

Pengawasan terhadap distributor, agen, dan rantai distribusi bahan pokok perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi antara Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, Perum Bulog, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Langkah tersebut bertujuan mencegah praktik penimbunan, spekulasi harga, maupun hambatan distribusi yang berpotensi memperbesar tekanan inflasi, khususnya menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat.

6. Mendorong Penguatan Produksi Pangan Lokal

Dalam jangka menengah, Pemerintah Kota Dumai perlu terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui optimalisasi pekarangan pangan, pengembangan hortikultura, serta pemberdayaan kelompok tani dan nelayan.

Meskipun upaya tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap inflasi jangka pendek, penguatan produksi lokal merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

7. Memperkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

Strategi komunikasi publik perlu diarahkan pada penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat mengenai perkembangan harga, kondisi stok, serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah. Komunikasi yang konsisten diharapkan dapat menjaga ekspektasi masyarakat, mengurangi potensi panic buying, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pengendalian inflasi.

8. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi Program TPID

Pelaksanaan program pengendalian inflasi perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan

evaluasi yang lebih terstruktur melalui penetapan indikator kinerja yang terukur.

Setiap intervensi TPID perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan (*output*), tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap stabilisasi harga, kelancaran distribusi, keterjaminan pasokan, dan pengendalian ekspektasi masyarakat (*outcome*). Pendekatan tersebut akan menghasilkan proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang lebih baik dan menjadi dasar penyempurnaan strategi pengendalian inflasi pada periode berikutnya.

Penutup

Keberhasilan pengendalian inflasi merupakan hasil dari sinergi berbagai pemangku kepentingan dan tidak dapat diukur hanya dari perkembangan angka inflasi dalam jangka pendek. Dinamika inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi cuaca, perkembangan harga komoditas global, kebijakan nasional, serta karakteristik rantai pasok daerah.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola TPID perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelaksanaan intervensi yang adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan. Dengan pendekatan tersebut, TPID Kota Dumai diharapkan semakin mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.